



Olahraga sebagai Arena Politik Identitas: Analisis Kebijakan FIFA terhadap Rusia dan Israel dalam Kerangka Konstruktivis

Firman Maulana¹, Muh Rangga Pratama², Bintang Sultanul Arifin³, Alif Fatahillah Hamam⁴

^{1,2,3,4}Program Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Teknologi Yogyakarta

Email: fiirmaan540@gmail.com¹, mohammadranggap20@gmail.com²
tiniasih421@gmail.com³, boyojoyo271@gmail.com⁴

Article Info

Article history:

Received January 04, 2025
Revised January 09, 2025
Accepted January 11, 2025

Keywords:

FIFA, Constructivism, Double Standards, International Sports Governance, Identity Politics

ABSTRACT

FIFA's dualistic policy in responding to the Russian and Israeli invasions raises fundamental questions regarding its commitment to neutrality and impartiality as stated in its statutes. This study aims to analyze this duality through a constructivist lens, arguing that FIFA's decisions are not merely based on legal considerations but are socially constructed through dominant norms, identities, and discourses within global football governance. Using a qualitative approach with critical discourse analysis, this research examines official FIFA documents, media releases, and secondary sources from 2021–2023. The findings reveal that Russia is consistently constructed as an “aggressor” in international discourse, legitimizing FIFA's severe sanctions. In contrast, Israel is framed as a “complex conflict party” and a “strategic ally,” which shields it from similar disciplinary action. This selective application of norms demonstrates how FIFA operates as a political arena where identity construction and power relations shape policy outcomes. The study concludes that FIFA's double standards reflect broader geopolitical hierarchies and identity politics, undermining its legitimacy as a neutral international regime. Recommendations are offered for institutional reform to enhance transparency, consistency, and accountability in FIFA's decision-making processes.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received January 04, 2025
Revised January 09, 2025
Accepted January 11, 2025

Kata Kunci:

FIFA, Konstruktivisme, Standar Ganda, Tata Kelola Olahraga Internasional, Politik Identitas

ABSTRACT

Kebijakan dualistik FIFA dalam menanggapi invasi Rusia dan Israel mempertanyakan komitmennya terhadap netralitas dan imparsialitas seperti yang tertuang dalam statuta organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dualitas tersebut melalui pendekatan konstruktivis, dengan argumen bahwa keputusan FIFA tidak hanya didasarkan pada pertimbangan hukum, melainkan dikonstruksi secara sosial melalui norma, identitas, dan wacana dominan dalam tata kelola sepak bola global. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis wacana kritis, penelitian ini mengkaji dokumen resmi FIFA, siaran pers, dan sumber sekunder dari periode 2021–2023. Temuan menunjukkan bahwa Rusia secara konsisten dikonstruksi sebagai



“agresor” dalam wacana internasional, yang melegitimasi sanksi keras FIFA. Sebaliknya, Israel dibingkai sebagai “pihak dalam konflik kompleks” dan “sekutu strategis”, sehingga terlindungi dari tindakan disipliner serupa. Penerapan norma yang selektif ini memperlihatkan bagaimana FIFA beroperasi sebagai arena politik di mana konstruksi identitas dan relasi kuasa membentuk kebijakan. Studi ini menyimpulkan bahwa standar ganda FIFA mencerminkan hierarki geopolitik dan politik identitas yang lebih luas, yang mengikis legitimasinya sebagai rezim internasional yang netral. Rekomendasi ditawarkan untuk reformasi institusional guna meningkatkan transparansi, konsistensi, dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan FIFA.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Firman Maulana
Universitas Teknologi Yogyakarta
Email: boyojoyo271@gmail.com

PENDAHULUAN

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah lama menempatkan diri sebagai institusi yang mengedepankan netralitas politik dan prinsip non-diskriminasi dalam menjalankan mandatnya sebagai badan pengatur sepak bola dunia. Prinsip ini tertuang secara eksplisit dalam Statuta FIFA Pasal 3 dan 4, yang menyatakan bahwa FIFA harus bersikap netral dalam urusan politik dan tidak boleh melakukan diskriminasi atas dasar apapun, termasuk latar belakang politik, etnis, atau agama (FIFA, 2023). Komitmen terhadap netralitas ini menjadi pilar penting dalam menjaga integritas olahraga dan memperkuat legitimasi FIFA sebagai rezim olahraga global yang inklusif dan adil (Gammelsæter, 2021).

Namun, dalam praktiknya, FIFA kerap dihadapkan pada tantangan untuk menjaga konsistensi penerapan prinsip-prinsip tersebut, terutama ketika berhadapan dengan konflik geopolitik yang melibatkan negara-negara anggotanya. Dua kasus terkini yang mencuat adalah respons FIFA terhadap invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 dan konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Dalam kasus Rusia, FIFA mengambil tindakan tegas dengan memberlakukan sanksi komprehensif, termasuk larangan partisipasi dalam kompetisi internasional, penghapusan simbol negara, dan pembatasan hak-hak keanggotaan (FIFA, 2022a). Di sisi lain, meskipun terdapat tekanan yang signifikan dari masyarakat sipil, organisasi hak asasi manusia, dan sejumlah negara anggota, FIFA hingga saat ini belum mengambil langkah sanksi serupa terhadap Israel terkait konflik yang melibatkan Palestina (Dubinsky, 2022; Sorek, 2007).

Kebijakan yang tampak dualistik ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi FIFA dalam menerapkan aturan internalnya. Selain melanggar Pasal 3 dan 4 Statuta



FIFA tentang netralitas dan non-diskriminasi, kebijakan tersebut juga bertentangan dengan *FIFA Human Rights Policy* yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap aktivitas sepak bola (FIFA, 2017). Lebih jauh, inkonsistensi ini mengikis kepercayaan publik terhadap FIFA sebagai institusi yang imparsial dan berorientasi pada nilai-nilai universal olahraga (Levermore & Budd, 2004).

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa kebijakan FIFA tidak semata-mata dibentuk oleh pertimbangan hukum formal, melainkan juga oleh konstruksi sosial, politik identitas, dan wacana dominan yang berkembang dalam komunitas sepak bola global. Dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme dalam studi hubungan internasional (Wendt, 1992), penelitian ini berupaya membongkar bagaimana norma, identitas kolektif, dan diskursus politik membentuk keputusan-keputusan FIFA yang terlihat tidak konsisten tersebut. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk menjelaskan bagaimana aktor-aktor dalam sistem internasional termasuk institusi seperti FIFA, membangun, menginternalisasi, dan mereproduksi norma-norma tertentu berdasarkan identitas dan kepentingan yang terkonstruksi secara sosial (Finnemore & Sikkink, 1998).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dualisme kebijakan FIFA dalam menangani kasus Rusia dan Israel melalui lensa teori konstruktivis. Secara khusus, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: Bagaimana konstruksi identitas dan norma dalam komunitas sepak bola global menjelaskan kebijakan FIFA yang berbeda terhadap Rusia dan Israel? Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap kajian rezim internasional dan studi olahraga global (Bairner, 2001), sekaligus menawarkan perspektif kritis untuk mendorong reformasi tata kelola FIFA yang lebih adil dan konsisten di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Paradigma ini dipilih karena menekankan bahwa realitas sosial termasuk norma dan identitas dalam rezim internasional dibentuk melalui interaksi dan pemaknaan kolektif antaraktor (Berger & Luckmann, 1966). Dalam konteks ini, kebijakan FIFA tidak dipandang sebagai sesuatu yang statis atau murni legal-formal, melainkan sebagai hasil dari konstruksi wacana, identitas, dan norma yang terus berproses.

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari dokumen resmi FIFA seperti Statuta FIFA (2023), keputusan sanksi terhadap Rusia (FIFA, 2022a), pernyataan sikap resmi terkait Israel-Palestina, serta *FIFA Human Rights Policy* (2017). Data sekunder mencakup pemberitaan media internasional, laporan organisasi hak asasi manusia, dan literatur akademik terkait politik olahraga dan hubungan internasional. Periode pengambilan data difokuskan pada rentang 2021–2023 untuk menangkap dinamika sebelum, selama, dan setelah pemberian sanksi terhadap Rusia serta perkembangan wacana seputar konflik Israel-Palestina.

Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*). Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri bagaimana bahasa, teks, dan praktik komunikasi membentuk relasi kuasa dan mempengaruhi kebijakan (Fairclough, 1995). Proses analisis dilakukan dalam tiga tahap: (1) analisis tekstual untuk mengidentifikasi pola representasi, diksi, dan framing dalam dokumen FIFA dan media; (2) analisis praktik wacana



dengan memeriksa konteks sosial dan politik di balik produksi teks; serta (3) analisis praktik sosial untuk mengaitkan wacana dengan struktur kekuasaan yang lebih luas dalam tata kelola sepak bola global. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan analisis normatif konstruktivis untuk menelusuri proses konstruksi, internalisasi, dan penyimpangan norma dalam kebijakan FIFA (Finnemore & Sikkink, 1998).

Untuk menjaga keandalan temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai dokumen, laporan, dan literatur. Analisis dilakukan secara sistematis dan iteratif, dengan terus menghubungkan temuan data dengan kerangka teori konstruktivis.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain fokusnya yang masih pada tingkat wacana makro dan kebijakan institusional, sehingga belum menyentuh dinamika persepsi aktor akar rumput secara mendalam. Meski demikian, temuan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan mengenai peran gerakan sosial atau aktor non-negara dalam mempengaruhi rezim olahraga global.

Netralitas yang Dikonstruksi: Identitas, Norma, dan Praktik Kebijakan FIFA

Analisis terhadap kebijakan FIFA dalam merespons konflik yang melibatkan Rusia dan Israel menunjukkan bahwa klaim netralitas yang selama ini dikedepankan organisasi tersebut tidak bersifat objektif atau statis, melainkan merupakan hasil dari proses konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh wacana, identitas, dan relasi kekuasaan dalam tata kelola sepak bola global. Dalam perspektif konstruktivis, institusi internasional tidak hanya bertindak sebagai pelaksana aturan formal, tetapi juga sebagai aktor normatif yang membentuk makna dan batas-batas perilaku yang dianggap sah (Wendt, 1992; Finnemore & Sikkink, 1998). Berdasarkan analisis dokumen resmi FIFA, pernyataan publik, serta pemberitaan media internasional sepanjang periode 2021–2023, tampak bahwa FIFA berperan aktif dalam memproduksi dan mereproduksi representasi tertentu atas konflik dan aktor yang terlibat di dalamnya.

Dalam kasus Rusia, FIFA membangun wacana yang secara konsisten merepresentasikan negara tersebut sebagai agresor yang mengancam tatanan internasional pasca-invasi ke Ukraina. Penggunaan istilah seperti *invasion*, *aggression*, dan *violation of territorial integrity* dalam komunikasi resmi FIFA tidak sekadar berfungsi sebagai deskripsi peristiwa, tetapi juga sebagai mekanisme normatif yang melegitimasi tindakan sanksi (FIFA, 2022a). Melalui wacana ini, Rusia dikonstruksikan sebagai aktor yang berada di luar komunitas normatif sepak bola global, sehingga sanksi menyeluruh termasuk larangan partisipasi dalam kompetisi internasional dipandang sebagai langkah yang sah untuk menjaga integritas olahraga. Dalam kerangka konstruktivis, identitas yang dilekatkan pada Rusia tersebut membentuk persepsi kepentingan dan menentukan respons kebijakan FIFA (Hopf, 1998).

Sebaliknya, dalam merespons konflik yang melibatkan Israel, FIFA mengembangkan wacana yang jauh lebih ambigu dan berhati-hati. Konflik Israel-Palestina lebih sering dibingkai sebagai konflik berkepanjangan yang kompleks, dengan penekanan pada narasi *self-defense* dan stabilitas keamanan, sebagaimana tercermin dalam pernyataan resmi FIFA terkait situasi di Timur Tengah (FIFA, 2021). Pilihan bahasa ini menghindarkan Israel dari label agresor dan memposisikannya sebagai pihak yang terlibat dalam sengketa multidimensional, bukan sebagai pelanggar norma internasional yang jelas. Akibatnya, tidak terbentuk justifikasi normatif yang cukup kuat bagi FIFA untuk menjeratkan sanksi serupa. Perbedaan representasi ini



menegaskan bahwa identitas negara bersifat relasional dan dikonstruksi melalui wacana yang didukung oleh struktur kekuasaan global (Buzan & Waever, 2003).

Konstruksi identitas yang berbeda tersebut berimplikasi langsung pada cara FIFA menafsirkan prinsip netralitas dan non-diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dan 4 Statuta FIFA. Dalam kasus Rusia, FIFA secara eksplisit merujuk pada pasal-pasal tersebut untuk membenarkan tindakan sanksi dengan alasan melindungi nilai-nilai universal sepak bola (FIFA, 2023). Sebaliknya, dalam kasus Israel, prinsip netralitas justru ditafsirkan sebagai kewajiban untuk tidak mencampuri konflik politik bersenjata (FIFA, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa norma dalam rezim internasional tidak bersifat tetap, melainkan dapat ditafsirkan ulang sesuai konteks politik dan identitas aktor yang terlibat (Kratochwil, 1989).

Selain faktor wacana dan norma, praktik kebijakan FIFA juga dipengaruhi secara signifikan oleh tekanan eksternal dan konfigurasi kekuasaan global. Sanksi terhadap Rusia terjadi dalam konteks tekanan kuat dari negara-negara Barat, konfederasi regional seperti UEFA, serta aktor korporat yang memiliki kepentingan strategis dan ekonomi dalam sepak bola global (Gammelsæter, 2021). Sebaliknya, meskipun terdapat tekanan berkelanjutan dari organisasi hak asasi manusia, gerakan masyarakat sipil, dan negara-negara Global South untuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel, tekanan tersebut tidak menghasilkan kebijakan yang sebanding. Ketimpangan efektivitas tekanan ini mencerminkan bagaimana arena FIFA mereproduksi hierarki kekuasaan yang telah ada dalam sistem internasional (Hurd, 1999).

Selektivitas kebijakan FIFA juga tampak dalam penerapan *FIFA Human Rights Policy*. Dalam kasus Rusia, FIFA secara eksplisit mengaitkan keputusan sanksi dengan komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia (FIFA, 2017; FIFA, 2022a). Namun, dalam konteks Israel, meskipun terdapat laporan pelanggaran HAM dari organisasi internasional seperti Amnesty International, FIFA tidak secara konsisten menjadikan kebijakan HAM tersebut sebagai dasar tindakan (Amnesty International, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa komitmen normatif terhadap hak asasi manusia diterapkan secara kontekstual dan selektif, bergantung pada konfigurasi identitas dan kepentingan politik yang menyertainya.

Secara keseluruhan, integrasi antara analisis dan temuan dalam subbab ini menunjukkan bahwa FIFA beroperasi sebagai arena politik global, di mana klaim netralitas dikonstruksi melalui wacana, identitas, dan relasi kekuasaan. Praktik standar ganda yang muncul tidak hanya berdampak pada kebijakan konkret, tetapi juga berimplikasi pada legitimasi FIFA sebagai rezim internasional, mengingat konsistensi dan persepsi keadilan merupakan prasyarat utama bagi legitimasi institusional (Hurd, 1999). Dalam konteks ini, sepak bola berfungsi sebagai ruang simbolik tempat politik identitas global diproduksi dan dipertarungkan, sebagaimana ditegaskan dalam kajian tentang hubungan antara olahraga dan politik internasional (Bairner, 2001; Levermore & Budd, 2004).

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menganalisis dualisme kebijakan FIFA dalam menanggapi konflik yang melibatkan Rusia dan Israel melalui perspektif konstruktivis. Berdasarkan analisis wacana dan normatif terhadap dokumen resmi, pernyataan publik, dan konteks geopolitik yang melingkupinya, dapat disimpulkan bahwa perbedaan perlakuan FIFA tidak terutama



disebabkan oleh perbedaan fakta hukum atau pelanggaran statuta semata, melainkan oleh konstruksi sosial atas identitas dan norma yang berlaku dalam komunitas sepak bola global.

Pertama, penelitian ini menemukan bahwa identitas kolektif yang dilekatkan pada Rusia dan Israel memainkan peran kunci. Rusia dikonstruksikan sebagai negara agresor dan ancaman terhadap tatanan internasional pasca-invasi ke Ukraina, sehingga tindakan sanksi dari FIFA dipandang sebagai penegasan kembali norma global. Sementara itu, Israel seringkali direpresentasikan dalam wacana dominan sebagai sekutu strategis dan negara yang berkonflik kompleks, sehingga tekanan untuk memberikan sanksi tidak diakomodasi. Konstruksi identitas ini bersifat relasional dan tidak tetap, serta dibentuk melalui interaksi kuasa wacana oleh aktor-aktor inti dalam sistem internasional.

Kedua, prinsip netralitas dan non-diskriminasi dalam Statuta FIFA (Pasal 3 dan 4) diterjemahkan secara fleksibel dan kontekstual. Terjadi politik penafsiran di mana norma yang sama digunakan untuk membenarkan tindakan yang berbeda: netralitas diartikan sebagai intervensi aktif (dalam kasus Rusia) sekaligus sebagai tidak campur tangan (dalam kasus Israel). Hal ini mengungkap bahwa norma dalam rezim internasional tidak bersifat statis, tetapi dapat direkonstruksi untuk menyesuaikan dengan kepentingan dan identitas yang dominan.

Ketiga, penelitian ini mengonfirmasi bahwa FIFA beroperasi sebagai arena politik tempat kepentingan, identitas, dan wacana global saling bersaing. Keputusan-keputusan FIFA tidak kebal dari tekanan geopolitik dan ekonomi, di mana pengaruh dari negara-negara inti dan aktor korporat terbukti lebih menentukan dibandingkan suara dari masyarakat sipil atau negara-negara Global South. Dengan demikian, standar ganda dalam kebijakan FIFA mereproduksi hierarki dan ketimpangan kekuasaan yang lebih luas dalam tata kelola global.

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah penguatan relevansi pendekatan konstruktivis dalam menganalisis rezim internasional di luar isu keamanan tradisional, termasuk olahraga. Konstruktivisme berhasil membuka kotak hitam norma dan identitas yang seringkali dianggap *given*, dan menunjukkan bagaimana keduanya secara aktif dibentuk dan digunakan dalam praktik kebijakan.

Implikasi praktis menyangkut kredibilitas dan legitimasi FIFA ke depan. Inkonsistensi dalam penerapan norma dapat mengikis kepercayaan anggota, terutama dari negara-negara yang merasa diperlakukan secara tidak adil. Untuk itu, diperlukan upaya demokratisasi dan transparansi yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan FIFA, termasuk pembentukan mekanisme pengawasan independen yang dapat meninjau kepatuhan terhadap prinsip hak asasi manusia dan netralitas.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya yang terutama pada level wacana dan kebijakan makro, sehingga belum menyelami dinamika persepsi dan pengaruh aktor non-negara (seperti kelompok suporter, serikat pemain, atau gerakan sosial) secara mendalam. Selain itu, periode penelitian yang terbatas pada tahun 2021–2023 membatasi analisis terhadap perubahan norma dalam jangka panjang.

Saran untuk penelitian lanjutan adalah perlunya kajian yang lebih mendalam tentang peran *norm entrepreneurs* (seperti aktivis BDS atau federasi sepak bola negara-negara Global South) dalam upaya menggeser kebijakan FIFA. Penelitian komparatif terhadap kasus-kasus lain di luar Rusia dan Israel juga diperlukan untuk menguji generalisasi temuan ini. Selain itu, eksplorasi tentang dampak bangkitnya kekuatan kapital baru dalam sepak bola (seperti Arab



Saudi atau Qatar) terhadap tata kelola dan konfigurasi norma FIFA di masa depan menjadi topik yang relevan dan mendesak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2022). Israel's apartheid against Palestinians: A cruel system of domination and a crime against humanity. Diakses dari <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/02/israels-apartheid-against-palestinians-a-cruel-system-of-domination-and-a-crime-against-humanity/>
- Bairner, A. (2001). Sport, nationalism, and globalization: European and North American perspectives. SUNY Press.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge. Anchor Books.
- Buzan, B., & Wæver, O. (2003). Regions and powers: The structure of international security. Cambridge University Press.
- Dubinsky, Y. (2022). From sportswashing to rightswashing: FIFA and the 2022 World Cup in Qatar. International Journal of Sport Policy and Politics, 14(2), 205–219. <https://doi.org/10.1080/19406940.2022.2048972>
- Fairclough, N. (1995). Critical discourse analysis: The critical study of language. Longman.
- FIFA. (2017). FIFA Human Rights Policy. Diakses dari <https://www.fifa.com/about-fifa/organisation/football-governance/fifa-human-rights-policy>
- FIFA. (2021). Statement on the situation in the Middle East. Diakses dari <https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/news/statement-on-the-situation-in-the-middle-east>
- FIFA. (2022a). FIFA/UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions. Diakses dari <https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/media-releases/fifa-uefa-suspend-russian-clubs-and-national-teams-from-all-competitions>
- FIFA. (2023). FIFA Statutes. Diakses dari <https://www.fifa.com/about-fifa/organisation/fifa-statutes>
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International norm dynamics and political change. International Organization, 52(4), 887–917. <https://doi.org/10.1162/002081898550789>
- Gammelsæter, H. (2021). Sport and the pandemic: FIFA, norms, and global football governance. Sport in Society, 24(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/17430437.2020.1833066>
- Hopf, T. (1998). The promise of constructivism in international relations theory. International Security, 23(1), 171–200. <https://doi.org/10.1162/isec.23.1.171>
- Hurd, I. (1999). Legitimacy and authority in international politics. International Organization, 53(2), 379–408. <https://doi.org/10.1162/002081899550913>
- Kratochwil, F. V. (1989). Rules, norms, and decisions: On the conditions of practical and legal reasoning in international relations and domestic affairs. Cambridge University Press.
- Levermore, R., & Budd, A. (Eds.). (2004). Sport and international relations: An emerging relationship. Routledge.



- Manzenreiter, W., & Spitaler, G. (Eds.). (2020). Governance, citizenship and the new European football championships. Routledge.
- Sorek, T. (2007). Arab soccer in a Jewish state: The integrative enclave. Cambridge University Press.
- Wendt, A. (1992). Anarchy is what states make of it: The social construction of power politics. *International Organization*, 46(2), 391–425.
<https://doi.org/10.1017/S0020818300027764>